

KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDUKUNG DESA TANGGUH BENCANA LAWAN

COVID-19

Corona Viruse Disease 2019

Dr. Nata Irawan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa



TUPOKSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENANGANAN COVID-19

COVID-19



Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

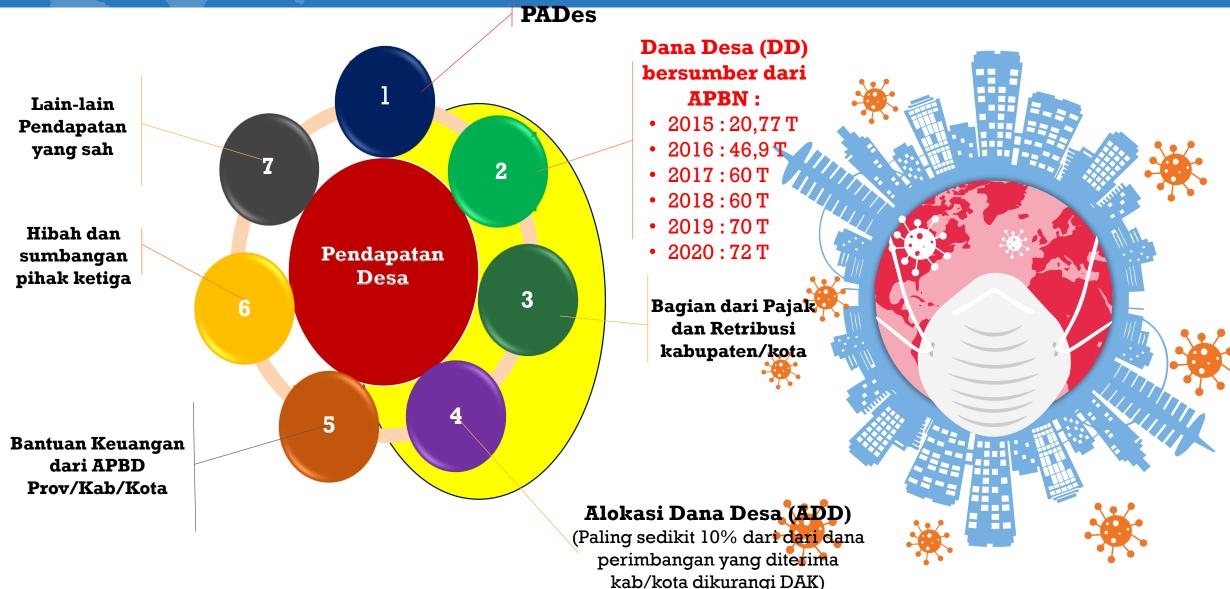


Kementerian Dalam Negeri diberikan amanah untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk koordinasi upaya antisipasi penyebaran dan penanganan dampak COVID-19 di Desa



DANA DESA

sebagai salah satu sumber pendapatan desa





PENYALURAN DAN PENYERAPAN DANA DESA TAHUN 2020

Alokasi awal Dana Desa Tahun 2020

Rp. 72 Triliun



Alokasi Akhir Dana Desa Tahun 2020

Rp. 71,19 Triliun

PENYALURAN DANA DESA THN 2020

Tahap 1

Sudah salur: 74.883 Desa (99,91%)

Nilai Salur: Rp. 28,648 Triliun (98,29%)

Tahap 2

Sudah salur: 58.299 Desa (99,91%)

Nilai Salur: Rp. 18,616 Triliun (64,68%)

Tahap 3

Sudah salur: 519 Desa (0,69%)

Nilai Salur: Rp. 79,99 Miliar (0,60%)

Total penyaluran DD per 30 Juli 2020

Rp. 47,345 Triliun dari Rp. 71,190 Triliun

PENYALURAN BLT-DD THN 2020

Bulan 1

Sudah salur: 72.942 Desa Untuk 7.798.827 KPM

senilai Rp 4.679.296.200.000

Bulan 2

Sudah salur: 61.134 Desa Untuk 6.359.657 KPM

senilai Rp 3.815.794.200.000

Bulan 3

Sudah salur: 27.192 Desa Untuk 2.608.373 KPM

senilai Rp 1.565.023.800.000

Total penyaluran BLT-DD per 30 Juli 2020

Rp 10.085.491.800.000 dari 21,800 Triliun

(66,51%)

(46,26%)



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA

- Jaring Pengaman Sosial selanjutnya disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- Padat Karya Tunai di Desa
- Penguatan ekonomi Desa



POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA KEMENDAGRI (1)

01

Memastikan Dana Desa Tahun 2020 tersalurkan sesuai ketentuan

02

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penganganan COVID-19 di Desa



Dalam melaksanakan tugasnya bermitra dengan bhabinkamtibmas, babinsa dan mitra desa lainnya serta berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 kabupaten/kota





POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA KEMENDAGRI (2)

03

Memfasilitasi Pemerintah Desa untuk segera membelanjakan dan/atau melakukan perubahan APBDesa yang bersumber dari pendapatan desa termasuk Dana Desa, untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19 berdasarkan kewenangan desa

04

Kegiatan penanggulangan COVID-19 dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT), dalam bentuk pelaksanaan Padat Karya Tunai, kegiatan Penguatan Ekonomi Desa, dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

05

Mengoptimalkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Aparat Pemerintah Daerah terkait termasuk Camat, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APBDesa dilakukan secara efektif,efisien, transparan dan akuntabel

06

Mendorong optimalisasi peran PKK dalam mendukung sosialisasi protokol kesehatan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di wilayah pedesaan

07

Mengoptimalkan peran Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di desa, seperti; RT/RW, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat desa terkait Covid-19 dan upaya pencegahannya



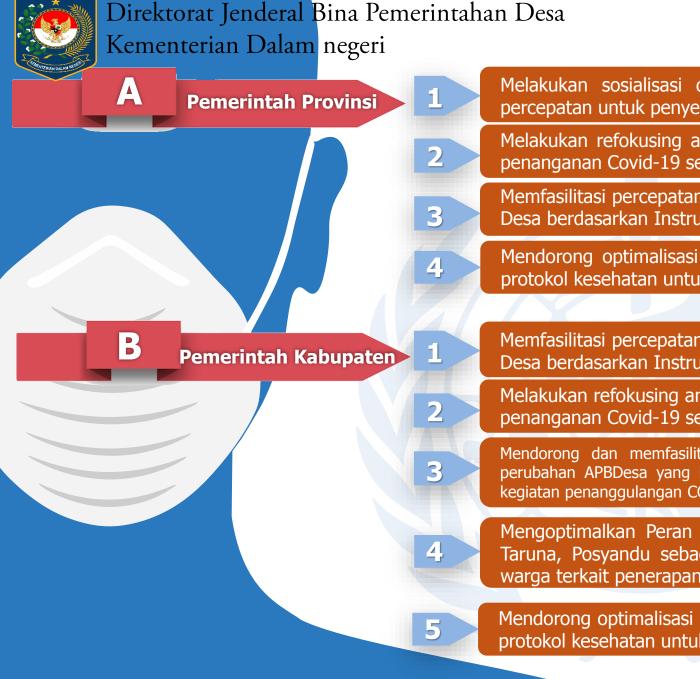
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam negeri

ARAHAN PRESIDEN
RAPAT TERBATAS
TENTANG PENANGANAN
COVID-19 DAN
PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL DI ISTANA
MERDEKA, JAKARTA,
SENIN, 3 AGUSTUS 2020)

PANDE MIC



Saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi di TV, di medsos, dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini dengan caracara yang berbeda"



Melakukan sosialisasi dan edukasi yang massif kepada masyarakat sebagai langkah percepatan untuk penyesuaian Adaptasi Kebiasaan Baru

Melakukan refokusing anggaran APBD Provinsi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 serta upaya penerapan adaptasi kebiasaan baru

Memfasilitasi percepatan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penganganan COVID-19 di Desa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020

Mendorong optimalisasi peran Tim Penggerak PKK Provinsi dalam mendukung sosialisasi protokol kesehatan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19)

Memfasilitasi percepatan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penganganan COVID-19 di Desa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020

Melakukan refokusing anggaran APBD Kabupaten untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 serta upaya penerapan adaptasi kebiasaan baru

Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk segera membelanjakan dan/atau melakukan perubahan APBDesa yang bersumber dari pendapatan desa termasuk Dana Desa, untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19 berdasarkan kewenangan desa

Mengoptimalkan Peran Camat, Lembaga-Lembaga Desa, termasuk BPD, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu sebagai ujung tombak terdepan dalam upaya sosialisasi dan edukasi warga terkait penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Mendorong optimalisasi peran Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam mendukung sosialisasi protokol kesehatan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19)



Harapan Kemendagri terhadap Stake Holder Pemerintah Daerah dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru







2

3

Mampu mengendalikan penularan COVID-19 di wilayah pedesaan



Mampu mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di Desa untuk memastikan seluruh Desa di Indonesia menuju Adaptasi Kebiasaan Baru: Produktif dan Aman COVID-19



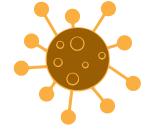
Melakukan re-focusing anggaran APBDesa, melalui optimalisasi kegiatan penanganan Covid-19 di desa dan Bantuan Langsung Tunai



Mengoptimalkan peran RT/RW, Karang Taruna, Posyandu dan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak terdepan dalam upaya sosialisasi dan edukasi warga terkait penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru



Mendorong Tim Penggerak PKK Desa untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dari rumah ke rumah sebagai langkah pencegahan penularan virus corona (Covid-19)

























ADAPTASI KEHIDUPAN BARU



Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam negeri



Dengan adanya
Buku Saku yang
menjadi panduan
bagi pemerintah
desa dalam
penanganan
Covid-19 ini,
maka Pemerintah
Desa diharapkan:

Kehadiran Buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan Covid-19 ini merupakan salah satu bentuk pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam rangka kesiapan Pemerintah Desa dalam menghadapi wabah pandemo Covid-19 dan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru



Dapat mengambil langkah dan kebijakan sesuai dengan karakteristik wilayahnya dalam menghadapi Covid-19 di desa



Dapat membangun program unggulan khas desa masing-masing, dalam rangka mengantarkan seluruh masyarakat desa untuk masuk ke pintu gerbang perubahan, yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru



Dapat membuat pranata sosial baru yamg sesuai dengan kebutuhan di desa untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi













Dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah COVID-19. Kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata.

Presiden Joko Widodo



PENERBIT DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA REMENDAG

Kantor Direktorat Jenderal Bind Pemerintahan L Kementerian Dalam Negeri Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19 Pasar Minggu Jako

🖶 www.kemendagriga.id 🥤 Kemendagri 🙉 💟 gikernendagri 🥮 gikernenda



